

e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020) 93-100
p-ISSN 2337-4721

SISTEM M-GOVERNMENT UNTUK OPTIMALISASI MANAJEMEN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PRINGSEWU

Miswan Gumanti¹⁾ Bernadhita H.S. Utami²⁾ Rita Irviani³⁾

Program Studi Sistem Informasi STMIK Pringsewu
mgumanti0205@gmail.com¹⁾ ind.indri1245@gmail.com²⁾

Abstract

The Department of Population and Civil Registration of Pringsewu Regency is an office that handles population fields such as making e-KTP, Family Cards (KK), Child Identity Cards (KIA), and Birth Certificates. In carrying out its duties as a public servant, this service does not yet have a system that can be used online so that people whose homes are far from the office experience problems in receiving these services, not to mention the requirements for making population administration sometimes not yet known by the public. This limitation makes researchers want to create a system that can be used by the community without having to come directly to the Disdukcapil office. The existence of this system is expected to help Disdukcapil employees in providing their services without being constrained by distance and time. The population data m-government (mobile government) system can be used as a source of information for both Pringsewu residents and residents outside Pringsewu regarding the terms and conditions in making population administration by simply accessing information / services by mobile.

Keywords: *system, m-government, population data, Department of Population and Civil Registration*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat, hal ini ditandai makin banyaknya penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan saat ini makin maraknya penggunaan website pada desa, kabupaten bahkan provinsi yang digunakan sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, (Hutahaean, 2014).

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi *internet, electronic commerce, electronic data interchange,*

virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara, (Al Fatta, 2007).

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet tentu disambut baik oleh semua kalangan, salah satunya bahkan telah merambah ke dunia pemerintahan sejak beberapa tahun terakhir, (Kadir, 2014). Sehingga hal ini menciptakan pelayanan pemerintah yang kompetitif diantara setiap lembaga pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat saat ini berkembang dengan pesat, (Kast dan Rosenzweig, 2002). Contohnya saja sistem antrian pada dinas pemerintah baik kabupaten maupun kota sudah banyak digunakan. Bahkan sekarang ini pemerintahan di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sistem informasi berbasis website baik itu desa, kabupaten/kota, maupun provinsi.

Menurut penelitian Hadiana dan Renaldi (2018). menyatakan bahwa aplikasi *m-Government* monitoring aktifitas aparatur sipil negara (ASN) dapat mempermudah kegiatan administratif kepegawaian terlebih dengan kemampuan sistem yang ditekankan kepada interaksi yang lebih interaktif dimana pegawai dilibatkan didalam sistem seperti melakukan pengisian peremajaan data yang dilakukan di dalam sistem dan dikoreksi secara langsung oleh kepegawaian apabila terdapat data atau persyaratan yang tidak valid. Pegawai juga mampu mengajukan menjadi peserta diklat, mengajukan cuti dan mengajukan mutasi dini dimana pegawai dapat melampirkan persyaratan dari setiap kegiatan administratif tersebut serta mampu mendapatkan informasi status dari kegiatan administratif yang sedang dilakukan. Begitu juga pihak kepegawaian Diskominfo dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian ini mampu lebih membantu dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dalam hal kelola data dan penyajian informasi yang diharapkan terhindar dari inkonsistensi data, dengan informasi yang disajikan melalui grafik kepegawaian juga mampu mendapatkan informasi dengan mudah yang menunjang bagi kegiatan administratif kepegawaian. Berdasarkan hasil pengujian terhadap aplikasi *m-government* di Diskominfo Kabupaten Bandung Barat untuk monitoring aktifitas aparatur sipil negara (ASN) diperoleh hasil uji responden menunjukkan rata-rata penilaian responden sebanyak 4.6 atau tingkat keberhasilan sebesar 92%, dimana semua fungsi telah sesuai dengan yang diharapkan, (Muqhita dan Handayaningsih, 2013).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan bentuk produktivitas kinerja, suatu organisasi harus mampu mengedepankan inovasi agar memberikan kepuasan kepada pelanggan, (Brantas, 2009).

Dalam hal ini, Disdukcapil diharapkan memiliki sistem yang lebih canggih sehingga dapat memberikan layanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi mengenai pembuatan administrasi kependudukan di Disdukcapil.

Kondisi Disdukcapil Kabupaten Pringsewu saat ini sudah memiliki website, namun belum berbasis mobile, sehingga jika dibuka dengan *smartphone* tampilannya tidak sesuai jika dibuka melalui PC, *notebook* ataupun laptop. Hal inilah yang membuat peneliti ingin membuat sebuah *m-government*. Sehingga memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kabupaten dalam mengakses informasi. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk merancang pembuatan *m-government* untuk mempermudah layanan E-KTP, KK, dan akta kelahiran.

Government Mobile

Menurut Indrajit (2006), "*m-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti *wide area network*, *internet* dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa *m-government* merupakan sistem pemerintahan yang buat dengan berbasis mobile sehingga datanya dapat diakses menggunakan handphone android.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

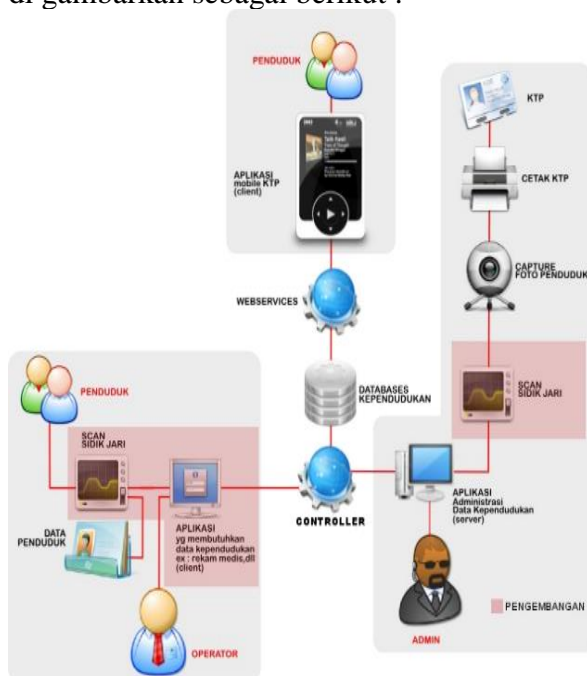
Observasi merupakan metode pengumpulan data tentang sistem informasi sekolah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu dengan datang ke Kantor Disdukcapil.

- b. Metode Wawancara
Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data penduduk dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala Dinas dan pegawai Disdukcapil Kab. Pringsewu.
- c. Studi Pustaka
Merupakan tahapan yang dilakukan dengan membaca buku atau jurnal yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, serta buku lain yang menunjang penelitian ini. Pada metode studi pustaka penulis membaca dan mencari referensi di internet mengenai pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian.

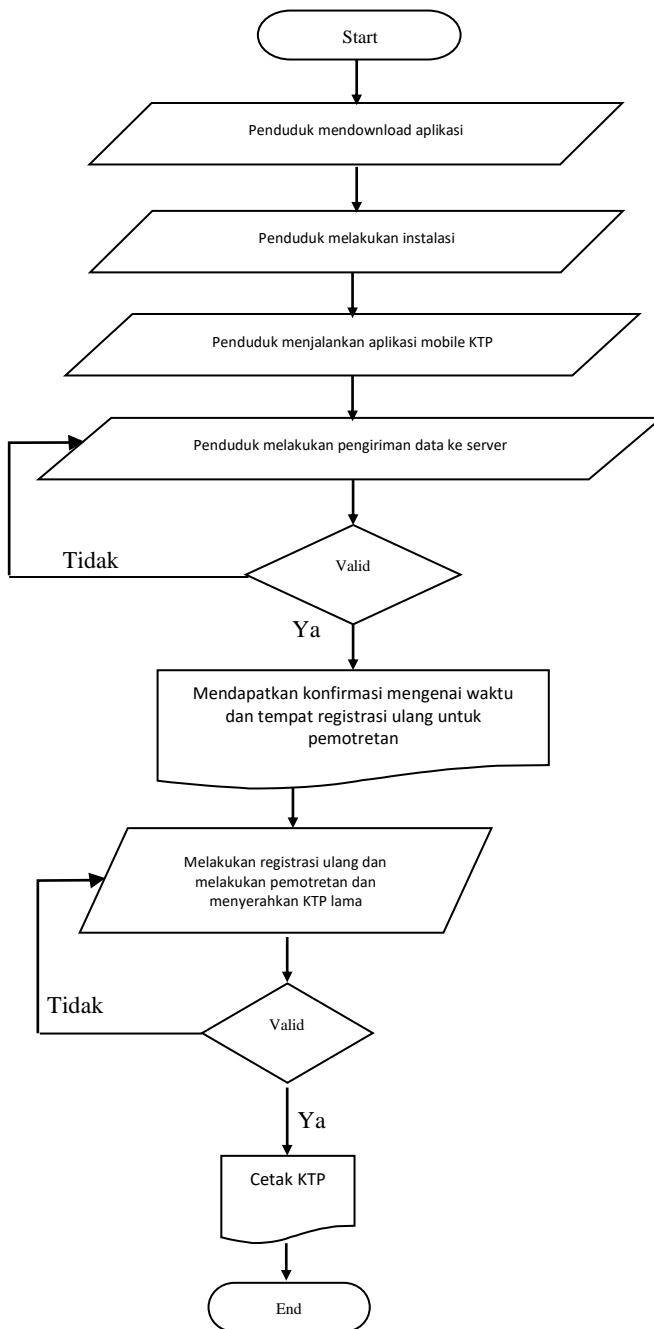
2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan gambaran secara umum mengenai alur kerja sistem yang akan dibuat, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai sistem tersebut, (Jogiyanto, 2015). Secara umum perancangan aplikasi mobile KTP dapat di gambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan gambaran umum alur kerja sistem diatas, maka dapat perancangan sistem dapat dibedakan menjadi dua, sistem yang pertama merupakan sistem yang berjalan menggunakan aplikasi *mobile* KTP dimana penduduk melakukan permohonan pembuatan/ perpanjangan KTP secara *remote*/jarak jauh melalui jaringan internet, sedangkan sistem yang kedua merupakan sistem yang berjalan menggunakan aplikasi Administrasi Data Kependudukan dimana penduduk melakukan permohonan pembuatan/ perpanjangan KTP dengan cara datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa dokumen terkait. Kemudian data akan dicatat oleh petugas menggunakan aplikasi tersebut, (Nugroho, 2008). Berikut ini adalah alur kerja sistem yang menggunakan aplikasi mobile KTP dapat dilihat pada flowchart berikut ini:

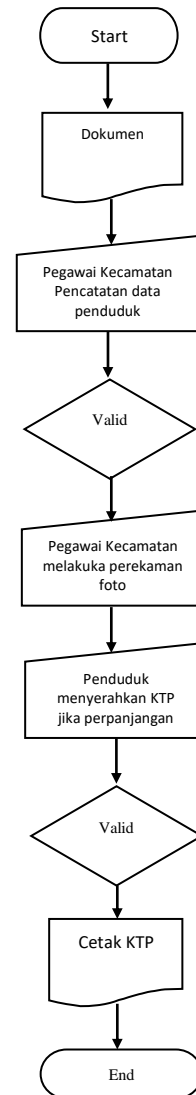


Gambar 1. Gambaran Umum Sistem



Gambar 2. Flowchart Alur Kerja Sistem aplikasi Mobile KTP

Berikut ini adalah alur kerja sistem yang menggunakan aplikasi sistem administrasi data kependudukan:

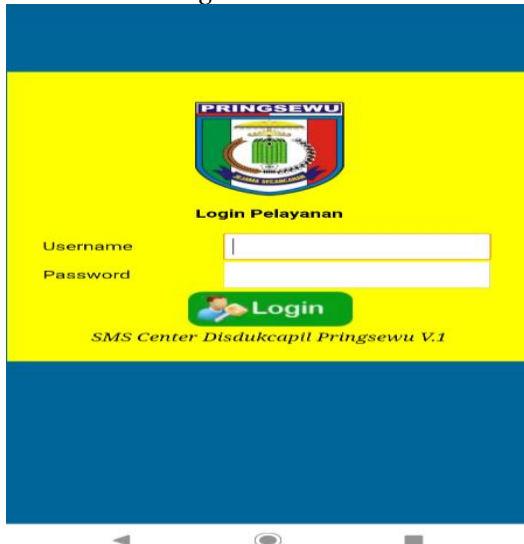


Gambar 3. Flowchart alur kerja sistem yang menggunakan aplikasi sistem administrasi data kependudukan

Implementasi

1. Tampilan Login

Berikut merupakan implementasi dari halaman *login*.



Gambar 4. Tampilan Permohonan KTP

2. Halaman Beranda

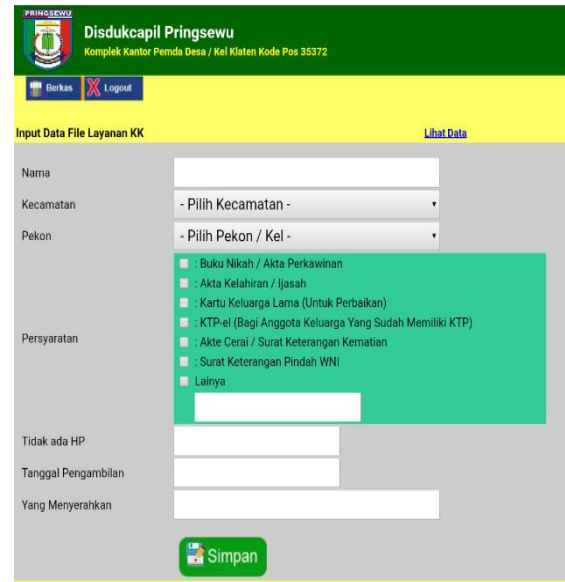
Halaman ini berisi kata sambutan dan berisi menu-menu aplikasi



Gambar 5. Halaman Beranda

3. Halaman Input File Layanan KK

Berikut merupakan implementasi dari halaman lihat data KK.



Gambar 6. Halaman Input File Layanan KK

4. Halaman Input Data File Layanan KTP

Berikut merupakan implementasi dari halaman lihat data KTP.



Gambar 7. Halaman Input Data File Layanan KTP

5. Halaman Input Data File Layanan Akta Kelahiran

Berikut merupakan implementasi dari halaman bagian pelayanan.

Gambar 8. Halaman Input Data File Layanan Akta Kelahiran

7. Halaman Input Data File Layanan Akta kematian

Halaman ini berisi data warga yang meninggal dunia.

Gambar 10. Halaman Input Data File Layanan Akta Kematian

6. Halaman Data Pencarian KK Pending

Berikut merupakan implementasi dari halaman *input* data penarian KK Pending.

Gambar 9. Halaman Input Data Warga

8. Halaman Input Data File Layanan SKPWNI

Halaman ini berisi tentang data layanan SKPWNI.

Gambar 11. Halaman Input Data File Layanan SKPWNI

9. Halaman Laporan Data Perperiode

Gambar 12. Halaman Laporan data Perperiode

10. Halaman Input Data File Layanan Akta Perkawinan

Gambar 13. Halaman Input Data File Layanan Akta Perkawinan

11. Halaman Data Pengguna Nama Petugas Nina Farikha

Data PENGGUNA Nama Petugas Nina Farikha

Tidak	Nama	Nama pengguna	Opsi
1	Nina Farikha	nina	Ubah

Disdukcapil Pringsewu 2020

Gambar 14. Halaman Data Pengguna Nama Petugas Nina Farikha

Berdasarkan rancangan aplikasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat digunakan untuk mendata penduduk yang lahir, yang meninggal dan dapat digunakan secara online. Sehingga memudahkan masyarakat dalam membuat KK, KTP, dan Akta Kelahiran melalui *smartphone*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dari perancangan sistem yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dihasilkan dua buah aplikasi yang terdiri dari: mobile KTP, merupakan aplikasi *mobile* berbasis *J2ME MIDP 2.0* yang berfungsi untuk melakukan registrasi permohonan KTP Baru, Penggantian KTP, Perpanjangan KTP, Permohonan Kartu Keluarga baru, dan Permohonan Menumpang Kartu Keluarga. Aplikasi Administrasi Data Kependudukan, merupakan aplikasi berbasis *J2SE* dengan *framework*

Hibernate dan *Spring* yang berfungsi sebagai pusat administrasi data permohonan yang dilakukan melalui aplikasi mobile KTP.

Saran

Penulis menyarankan agar Kantor Disdukcapil dapat melanjutkan sistem yang penulis rancang ke tahap pengembangan sistem. Saran yang mungkin bermanfaat untuk pengembangan sistem adalah penambahan fasilitas *backup database* untuk mencegah kehilangan data apabila *database* rusak.

Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta). *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2013. e-ISSN: 2338-5197

Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, H. (2007). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Hadiana, Asep Id dan Faiza Renaldi. 2018. *Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktivitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat*. Vol. 2 No. 2 Halaman 32 – 39 Oktober 2018.
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Ed 1. Deepublish. Yogyakarta.
- Indrajit, R.E. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto, H. M. 2015. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kast, F. E. dan J. E. Rosenzweig. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muqhita, D. dan S. Handayaningsih. 2013. *E-Readiness Pembuatan Model Sistem M-Government (Studi*